

BAB II

FEMINISME SEBAGAI IDEOLOGI YANG MEMPENGARUHI GERAKAN PEREMPUAN

Sebagai sebuah ideologi, feminisme mampu mempengaruhi gerakan perempuan di Perancis untuk memperoleh hak mereka. Ideologi feminisme tumbuh karena adanya ketimpangan yang terjadi di dalam tatanan masyarakat. Adanya rasa pemasungan terhadap peran dan hak perempuan dalam berbagai sektor menggelitik untuk disikapi. Hal inilah yang memunculkan pemikiran-pemikiran yang kemudian berkembang menjadi ideologi di masyarakat luas. Feminisme bukanlah ideologi yang monolitik, dan tidak berfikiran sama. Feminisme lebih mudah dipahami sebagai suatu teks, suatu tawaran wacana, suatu kacamata yang pada akhirnya dimanifestasikan dalam bentuk gerakan yang terbagi menjadi beberapa aliran feminisme. Aliran feminisme tersebut antara lain feminisme liberal, feminisme radikal, dan feminisme sosialis. Beberapa aliran feminis ini yang pada akhirnya menentukan arah dan tujuan yang dipilih oleh masyarakat dalam menyikapi ketimpangan yang ada di masyarakat.

Feminisme berasal dari kata latin "femina" yang berarti sifat keperempuanan. Sesuai yang tertera dalam kamus politik, feminisme diartikan sebagai gerakan wanita yang menuntut persamaan hak dan derajat kaum wanita dengan hak dan derajat kaum pria.¹Gerakan wanita yang dimaksud disini adalah usaha pembebasan dari: rasisme, stereotyping, seksisme, penindasan perempuan,

¹BN, M. 1. ... SH. Kamus Politik, Edisi Revisi 2007 (Jakarta: Bustaka Sinar Harapan

dan phalogosentrisme. Feminisme menurut Goefe ialah teori tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan di bidang politik, ekonomi, dan sosial; atau kegiatan terorganisasi yang memperjuangkan hak-hak serta kepentingan perempuan.² Melalui pengertian yang diungkapkan berarti perempuan memiliki aktivitas dan inisiatif sendiri untuk memperjuangkan hak dan kepentingan tersebut dalam berbagai gerakan. Untuk lebih memahami pengertian tentang feminis, terlebih dahulu kita harus memahami konsep seks dan konsep gender. Pengertian seks atau jenis kelamin itu merupakan pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Secara permanen jenis kelamin ini tidak berubah, karena merupakan kodrat atau ketentuan Tuhan. Sedangkan gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural, melalui ajaran keagamaan ataupun kenegaraan. Konsep gender menyangkut semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki. Sifat yang dimiliki bukan mutlak milik laki-laki atau perempuan akan tetapi bisa berubah-ubah baik dari waktu ke waktu, tempat ke tempat lainnya, bahkan dari kelas ke kelas. Perbedaan gender inilah yang dianggap memicuketidakadilan. Bentuk ketidakadilan itu berupa proses pemiskinan ekonomi, anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotip melalui pelabelan negatif, beban kerja yang lebih panjang dan banyak, serta ideologi nilai peran gender. Secara umum kita dapat meyakini bahwa Feminisme menyatakan seks sebagai poros. Hal ini berhubungan dengan

²Goefe, *op. cit.*, hal. 5. *Gender dan Identitas Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka

kekuasaan yang mempengaruhi subordinasi perempuan disegala sektor. Dimana kekuasaan sepenuhnya dipegang oleh kaum laki-laki.

A. Masalah yang Dihadapi Perempuan Perancis

Walaupun perempuan telah memiliki hak untuk memilih, dan berhak untuk dipilih sebagai anggota parlemen layaknya kaum laki-laki. Hak memilih yang bersifat universal tidak dengan sendirinya mengarah kepada penegakan dewan legislatif (badan pembuat undang-undang) yang representatif.³ Elemen-elemen masyarakat menjadi tidak terwakili, rakyat miskin di pedesaan, dan tentu saja kaum perempuan. Jika kebijakan yang dibuat mencakup semua kalangan bukan hanya sekedar masalah jumlah, maka akan mengarah pada kebijakan legislatif. Kebijakan yang diambil akan sesuai untuk kepentingan masyarakat dari berbagai kalangan bukan hanya untuk golongan tertentu. Perempuan merasa partisipasi mereka dalam politik belum cukup terwakili. Banyaknya masalah yang dihadapi perempuan menjadi kendala representasi mereka dalam politik. Masalah yang dihadapi perempuan untuk meningkatkan keterwakilannya mencakup masalah sosial ekonomi, masalah dalam proses politik, dan masalah pendidikan. Adapun ketiga masalah tersebut, yakni:

1. Sosial Ekonomi

Dalam hukum Perancis kepatuhan tidak lagi termasuk kewajiban seorang istri, dan setiap warga negara perempuan memiliki hak untuk memilih, akan tetapi

kebebasan-kebebasan sipil ini masih teoritis selama mereka tidak disertai dengan kebebasan ekonomi.⁴Keterbatasan ekonomi menjadi halangan yang besar bagi pergerakan perempuan dalam politik. Pada dasarnya hubungan antara politik dan pembangunan ekonomi dinegara manapun di dunia terhubung dengan kesejahteraan partai politik. Kesejahteraan negara adalah seberapa besar pengeluaran pemerintah untuk kesehatan, kepolisian, jaminan sosial, dan infrastruktur. Ukuran kesejahteraan dan pengaruh pemerintah pada belanja negara adalah merupakan salah satu karakteristik yang digunakan untuk menilai suatu partai politik. Hal ini mempengaruhi keseimbangan antara para pekerja dengan pemilik usaha.⁵

Masalah sosial ekonomi yang dihadapi perempuan Perancis adalah, kemiskinan yang diakibatkan mengakarnya budaya patriarki. Ketertindasan yang dialami kaum pekerja dilakukan oleh kaum borjuis Perancis, mengakibatkan rendahnya upah yang diperoleh. Di perancis sosial ekonomi merupakan sektor utama yang mewakili 12 persen dari pekerjaan dan 12 persen dari GDP. Pada pertengahan abad ke 19, Perancis telah bergabung dengan era industrialisasi.⁶Ketika perempuan dihadapkan pada kenyataan untuk berjuang demi kelangsungan hidup, mereka dituntut untuk lebih banyak meluangkan waktunya memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka disibukkan dengan urusan rumah tangga atau menjadi karyawan di pabrik. Hal ini menghambat mereka

⁴Simone de Beauvoir,*Second Sex: kehidupan Perempuan*, (Pustaka Prometheus, 2003), Hal. 579.

⁵*Does political culture influence economic development?*, (akses 04 Agustus 2011); Sumber dari http://wiki.answers.com/Q/Does_political_culture_influence_economic_development
⁶*Economic History Of France*, (akses 04 Agustus 2011); Sumber dari

untuk berpartisipasi dalam politik. Sehingga mereka dituntut untuk bekerja fisik, dan dieksploitasi. Perempuan Perancis di lingkungan kerja terdiskriminasi dalam hal pembayaran upah kerja, pengangguran dan keamanan kerja. Feminis memandang pembayaran upah untuk pekerja merupakan kunci penting pembebasan perempuan, mereka menuntut pemerintah untuk menghentikan segala bentuk diskriminasi, dan memberikan mereka kesempatan yang sama.⁷

Di Perancis, terlihat jelas adanya pemisahan antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan. Perempuan menempati posisi dalam instansi pemerintahan sipil atau lokal, sebagai penjaga toko atau dalam perusahaan yang memberikan layanan terhadap individu, sistem pendidikan dan kesehatan. Sedangkan posisi yang diduduki kaum laki-laki sebagai legislator, manajer, dan pejabat senior. Pada tahun 1999, jumlah perempuan yang bekerja paruh waktu sebanyak 31,4 persen dibandingkan dengan laki-laki yang hanya 5,5 persen. Ini menunjukkan sebagian perempuan yang bekerja paruh waktu ingin bekerja penuh waktu namun tidak memungkinkan karena kurangnya kesempatan penuh waktu untuk perempuan.⁸ Masalah perempuan ditambah lagi karena pemerintah tidak memandang pekerjaan paruh waktu sebagai karir penuh. Perempuan Perancis sering mendapatkan status yang rendah dalam pekerjaan. Perbedaan ini menunjukkan masih hadirnya kesenjangan gender dalam dunia kerja di Perancis. Selain itu, tingkat pengangguran di Perancis pada tahun 1999, sebesar 12,1 persen untuk perempuan dan 8,9 persen untuk laki-laki. Melihat fenomena yang terjadi, perempuan yang

⁷Olivia Kuhlman, "Inequities of Contemporary French Women" *Claremont Colleges*, 29 November 2010 (akses 05 Agustus 2011); Sumber dari Claremont Colleges

paling merasakan dampak pada masa ekonomi yang sulit. Persentase yang berbeda menunjukkan bahwa perempuan ditempatkan untuk mengerjakan pekerjaan yang sangat tidak dihargai. Perbedaan upah kerja kian memperparah kondisi diskriminasi perempuan dalam sektor kerja. Satu-satunya alasan karena perbedaan jenis kelamin, ini terbukti untuk tingkat upah pada pekerjaan yang sama terjadi kesenjangan.

2. Proses Politik

Awal abad ke 21, lebih dari 95 persen Negara di dunia menjamin dua hak demokratik perempuan yang paling mendasar; hak memilih (*right to vote*) dan hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan (*right to stand for elections*).⁹Tingkat representasi perempuan yang rendah di beberapa parlemen di Eropa menjadi alasan pelanggaran terhadap hak asasi fundamental mereka. Tingkat representasi yang tidak berimbang dalam badan legislatif mengartikan bahwa perempuan yang sepatutnya menjadi suatu fungsi bagi demokratisasi ternyata lebih berfungsi untuk mempertahankan status quo. Kurangnya keterwakilan perempuan dalam politik Perancis diakibatkan oleh berakarnya gagasan patriarki yang menyatakan politik adalah permainan pria yang tidak cocok untuk perempuan. Mariette Sineau berpendapat bahwa masalah utama dalam politik Perancis adalah "*narrowminded and ageing leadership, [that] have mainly operated as nomination groups that favour the self-reproduction of male elites*". Kelompok laki-laki elit yang

mengakibatkan perempuan keluar dari politik. Misalnya di tingkat tinggi pegawai negeri sipil, anggota yang ditunjuk untuk jabatan legislatif ataupun eksekutif biasanya dari lembaga pendidikan penting di Perancis, yang mengekalkan tradisi laki-laki. Model maskulin yang didengungkan dalam politik ikut andil menjadi kendala bagi perempuan dalam politik. Kaum laki-laki sangat mendominasi dalam arena politik, menguasai aturan-aturan permainan politik dan mereka pula yang menentukan standar dalam mengevaluasi setiap masalah-masalah politik. Kehidupan dalam politik sering diatur sesuai dengan norma dan nilai laki-laki, bahkan menurut gaya hidup mereka. Adanya politik yang didominasi laki-laki menyebabkan perempuan menolak secara keseluruhan politik gaya laki-laki tersebut. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan terlihat juga dalam isi dan prioritas pembuatan keputusan yang ditentukan oleh kepentingan, latar belakang, dan pola kerja dari laki-laki dan perempuan. Perempuan cenderung memberi prioritas pada masalah kemasyarakatan, seperti jaminan sosial, pelayanan masyarakat dan isu perempuan serta anak. Tradisi sangat berpengaruh untuk menekan bahkan mendikte peran utama perempuan sebagai ibu dan istri. Adanya budaya patriarki memisahkan peran laki-laki dan perempuan menurut jenis kelamin. Pemisahan inilah yang menghalangi kemajuan perkembangan dan partisipasi perempuan dalam setiap proses politik. Ketika perempuan berkecimpung dalam politik seringkali muncul perasaan tidak menyenangkan dikarenakan pola dalam politik ditentukan oleh kaum laki-laki, sehingga perempuan harus mengikuti pola yang mereka susun. Bahkan mereka harus

nyaman tersebut. Definisi yang menyatakan politik itu tabu, kotor, penuh bahaya dan tidak cocok bagi perempuan sangat merugikan perempuan. Pemikiran ini mengakibatkan kaum perempuan menjauhi dunia politik. Politik itu kotor, ditandai dengan tindakan korupsi, banyaknya penyuapan dan pemerasan di berbagai sektor dalam politik yang mengakibatkan ketidakpercayaan perempuan terhadap politik. Partai politik menjadi wahana strategis bagi proses segregasi dan agregasi politik perempuan melalui perannya dalam proses pengambilan keputusan. Secara kualitas keterlibatan perempuan dalam dunia politik harus dengan *affirmative action*, yakni adanya kuota yang mengharuskan perempuan dilibatkan dalam proses politik baik di partai politik maupun pemerintahan.¹⁰

Peningkatan akan keterwakilan perempuan yang terjadi sangat kecil, hal ini dikarenakan peraturan atau hukum yang tidak ditaati, bahkan tidak ada hukumnya sama sekali. Perjuangan feminis Perancis untuk memiliki landasan hukum yang kuat dalam politik kerap mengalami kegagalan. Pada tahun 1982, Perancis menetapkan rancangan undang-undang bahwa jenis kelamin yang sama dalam list anggota untuk pemilihan daerah dibatasi maksimal 75 persen. Perempuan memiliki 25 persen bagian dalam pemilihan. Akan tetapi, undang-undang ini ditinjau kembali oleh Dewan Konstitusi (*Constitutional Council*) yang pada akhirnya dideklarasikan hanya sebagai sebuah artikel kuota dan tidak dicantumkan dalam konstitusi.¹¹

¹⁰ Tari Siwi Utami, *Perempuan Politik di Parlemen*. (Yogyakarta: Gama Media, 2001), Hal. 7-8.

¹¹ Mona Lena Krook, "Competing Claims: Quotas for Women and Minorities in India

3. Pendidikan

Selain masalah politik, ekonomi dan sosial, perempuan Perancis dihadapkan pada masalah pendidikan. Kendala buta huruf dan terbatasnya pendidikan mengakibatkan sangat sulit merekrut perempuan dengan kemampuan politik yang memungkinkan mereka bersaing dengan laki-laki. Perempuan dirasa memiliki kemampuan dan pemahaman yang sangat sedikit dalam hal politik. Keberadaan perempuan dalam politik hanya sebagai pelengkap, pemanis dan memerankan peran sekunder. Pendidikan Perancis dilakukan secara terpisah meliputi sekolah-sekolah yang terpisah, kurikulum yang terpisah, dan tujuan yang terpisah pula. Pendidikan untuk laki-laki mempersiapkan mereka menjadi pemimpin dan pekerja yang sukses serta dapat melayani negara, sedangkan pendidikan untuk perempuan mempersiapkan peran mereka dalam keluarga yakni menjadi ibu rumah tangga. Pada tahun 1850, pemerintah memberikan investasi pada pendidikan perempuan *Le Loi Falloux* atau yang biasa disebut *l'École des filles*.¹² Pemisahan jenis kelamin dalam pendidikan di Perancis berlangsung hingga tahun 1970, namun secara perlahan mengarah pada kesetaraan pendidikan. Perempuan Perancis mendapatkan kesetaraan dalam hal pendidikan lebih baik dari pada bidang lainnya, akan tetapi perempuan Perancis masih mengalami kesenjangan yang cenderung mempengaruhi perilaku mereka serta keputusan mereka di masa depan. Faktor yang memperkuat ketidaksetaraan perempuan dalam pendidikan ini dikarenakan dua hal, yakni perilaku guru dan materi yang

¹²Olivia Kuhlman, "Inequities of Contemporary French Women" *Claremont Colleges*, 29 November 2010 (akses 05 Agustus 2011); Sumber Claremont Colleges

disajikan dalam buku teks.¹³ Perilaku para pengajar yang secara tidak sengaja membawa dan memperkuat adanya stereotipe jender. Misalnya, guru-guru yang lebih berinteraksi terhadap anak laki-laki daripada perempuan. Sering adanya perbandingan antara anak perempuan dan laki-laki, sehingga anak perempuan kehilangan kepercayaan dirinya. Masalah yang kedua adalah materi yang disajikan dalam buku teks. Sangat jarang sekali perempuan dimunculkan sebagai fitur dalam buku pelajaran, yang mengindikasikan bahwa perempuan sangat tidak penting dalam sejarah. Walaupun menghadapi berbagai hambatan, perempuan Perancis mampu memperoleh akses yang sama dalam pendidikan. Pada tahun 1998, perempuan Perancis yang terdaftar dalam ISCED yakni sebesar 54,7 persen. Perancis merupakan negara yang sangat menghargai pendidikan, ini dibuktikan oleh negara yang memberikan anggaran negara sebesar 7 persen dari GDP untuk pendidikan. Perancis merupakan salah satu negara OECD, negara yang paling besar memberikan kontribusi kepada pendidikan.¹⁴

Pembangunan yang mengarah pada suatu kebangkitan nilai-nilai tradisional, partisipasi tenaga kerja, dan pendidikan yang lebih tinggi bagi perempuan, serta perubahan perilaku dalam persepsi tentang perempuan akan mampu meningkatkan sumber politik perempuansertamenyuarakan masalah yang

B. Feminisme Perancis

Feminisme Perancis pada umumnya lahir karena adanya tiga faktor pendorong. *Pertama*, ketidakadilan yang ditimbulkan oleh perbedaan gender. Sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk melalui ajaran keagamaan maupun kenegaraan atau yang biasa disebut gender, seringkali menimbulkan perbedaan antara kaum laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak mereka. Hal ini dikarenakan setiap masyarakat menggunakan jenis kelamin biologis sebagai titik tolak penggambaran gender. Akibat pandangan tersebut muncul pembagian-pembagian hak dan kewajiban dimasyarakat yang dirasa timpang dan hanya menguntungkan satu pihak. Hal inilah yang dirasa tidak adil oleh kaum perempuan. Mereka merasa termarginalkan, menjadi kaum minoritas. Dalam bidang ekonomi mereka mengalami proses pemiskinan, sedangkan dalam keputusan politik mereka dianggap tidak penting. Selain itu banyak kasus kekerasan yang diperoleh kaum perempuan diberbagai sektor. Dalam dunia kerja, mereka melakukan pekerjaan dengan waktu yang lebih panjang dan dalam jumlah yang lebih banyak dengan upah kerja yang diberikan lebih sedikit ketimbang kaum pria. Kemudian yang *kedua*, adanya protes-protes perempuan melawan diskriminasi. Diskriminasi dapat diartikan sebagai pembedaan perlakuan terhadap warga negara, pembedaan perlakuan antara kaum laki-laki dan perempuan. *Ketiga*, modernisasi yang sangat kuat, yang diartikan sebagai proses pergeseran nilai dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk bisa hidup sesuai dengan

tuntutan masa kini.¹⁵ Pengaruh modernisasi dapat dilihat dari masuknya perempuan yang berasal dari berbagai ras dan kelas kedalam kekuatan-kekuatan publik dan proses-proses politik. Dengan begitu, mulai muncul tuntutan yang dirasa harus melengkapai peran mereka baik dalam sektor publik dan keberlangsungan mereka dalam kancah politik. Akan tetapi pada kenyataannya mereka dibatasi haknya untuk berperan, sehingga berkembanglah pemikiran dan gerakan feminisme.

Pada perkembangannya, ideologi feminisme terbagi menjadi tiga aliran yakni Liberal, Sosialis dan Radikal. Ketiga aliran ini mempengaruhi gerak feminisme di Perancis. *Feminisme Liberal* menurut kholilah Atsabitah, adalah paham yang berjuang untuk menghapuskan berbagai perbedaan seksual sebagai langkah awal menuju kesetaraan sejati.¹⁶ Fokus perjuangan feminis liberal adalah mengenai bagaimana perempuan bisa ditarik keluar dari persoalan yang berhubungan dengan masalah politik dan ekonomi. Kontribusi dariFeminisme Liberal di Perancis sangat terlihat dari bentuk kuota yang diusulkan kaum feminis Perancis, namun paham ini kemudian berubah ke arah feminisme radikalkarena tuntutan reformasi hukum yang berprespektif keadilan melalui desakan 50 persen representasi bagi perempuan dalam parlemen atau parity. Bahkan, persentase yang diharuskan ini memiliki sanksi yang menekan partai politik untuk memenuhi jumlah perempuan. *Feminisme Sosialis* di Perancis muncul untuk menciptakan posisi yang sederajat dengan kepentingan modal dan kekuasaan. Feminis

¹⁵B.N. Marbun. SH, *Kamus Politik Edisi Revisi 2007* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007), 149

menuntut keadilan atas kelas borjuasi yang memiliki modal untuk tidak membedakan mereka dalam pemberian upah, dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk cuti kerja sesuai dengan kebutuhan, seperti cuti hamil, cuti haid dan melahirkan serta upah kerja antara mereka dengan laki-laki tidak dibedakan. *Feminisme Radikal* Perancis memperluas logika teoritisnya dengan menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki menggunakan bahasa yang berbeda, sehingga hal ini mengekspresikan perbedaan bawah sadar yang mendasar antara maskulin dan feminim. Rekonstruksi feminis Perancis terhadap feminis radikal melalui teori psikoanalisis posmodern Lacan semakin bersifat persuasif diantara para feminis radikal yang dipengaruhi oleh teori posmodern dan tertarik untuk mengembangkan feminisme kultural, yang menekankan cara dimana perempuan dapat mengembangkan kebudayaan dan wacana feminis yang lain.

Gerakan feminisme di Perancis diawali terjadinya Revolusi Perancis. Revolusi Perancis adalah masa dalam sejarah Perancis dari tahun 1789, dimana para moderat dan pendukung republikanisme menjatuhkan monarki absolut dan memaksa gereja katolik Roma menjalani restrukturisasi yang radikal. Revolusi Perancis terjadi karena kudeta yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte, yang secara jelas mengakhiri rezim lama. Revolusi perancis dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yakni; Raja bertindak sewenang-wenang karena tidak didasarkan oleh undang-undang yang ada di Perancis. Louis ke XVI, memiliki prinsip Negara adalah saya. Segala bentuk pengambilan keputusan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Selanjutnya akibat ketidakstabilan dan diskriminasi hak, yakni

kaum bangsawan dan kaum rohaniawan memiliki hak-hak istimewa, memungut pajak, tidak dikenai pajak dan memiliki tanah. Sedangkan rakyat kecil dibebankan pajak. Memburuknya keuangan Negara, dikarenakan ratu Marie Antoinete dan Madame de Poupere yang menggunakan uang Negara untuk kebutuhan pribadi mereka, ditambah banyaknya pejabat yang melakukan korupsi.

Revolusi Perancis bersemboyan *libertie, egalite, fraternity* yang berarti kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Semboyan tersebut memberikan dampak yang signifikan dalam sektor politik, ekonomi bahkan sosial. Dalam Sektor politik, revolusi Perancis menyadarkan rakyat menuntut kebebasan, menentang kekuasaan asing, memunculkan semangat nasionalisme, dan keinginan membentuk negara berkedaulatan rakyat. Dalam Sektor ekonomi, rakyat menuntut penghapusan hak istimewa bangsawan dan pendeta, agar rakyat hanya membayar pajak pada Negara, serta berhak memiliki tanah. Sedangkan dalam sektor sosial, menyebabkan munculnya kaum buruh, petani, serta kaum kapitalis.

Revolusi yang terjadi memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk merubah kondisi mereka bukan hanya pada level individual, tapi juga pada level sosial. Pada bulan Oktober tahun 1789, kaum perempuan *sans-cullote* yang merupakan buruh perempuan berjuang untuk menuntut hak mereka. Perempuan mulai menunjukkan diri mereka.¹⁷ Kaum revolusioner di Perancis terbagi kedalam kaum Jacobin radikal dan kaum Girondin moderat. Kaum Jacobin menginginkan dihapuskannya Monarki. Selain itu, mereka menuntut hak perempuan untuk memilih dan untuk dapat memegang jabatan sipil dan militer tertinggi dalam

¹⁷Marisa Rueda, Marta Rodriguez, Susan Alice Watkins, *Feminisme untuk Pemula* (Yogyakarta: Resist Book, 2007), 20-21

republik yang baru. Inilah yang merupakan awal gerakan feminisme untuk memperoleh hak mereka dalam politik untuk memilih.

Perempuan Perancis mendapatkan hak pilih mereka pada tahun 1944, waktu yang sangat lama sejak tuntutan pertama pada revolusi Perancis di tahun 1789. Hal ini dikarenakan persamaan yang diberikan dan hak sebagai warganegara untuk perempuan tidak digunakan untuk meningkatkan representasi perempuan dalam institusi politik.¹⁸ Perempuan yang memiliki hak suara berharap mereka memiliki kesempatan untuk berada dalam parlemen dan dapat mereka raih ketika ada upaya yang berkelanjutan.

Perancis merupakan negara yang memiliki tingkat keterwakilan perempuan dalam politik terendah dibandingkan negara-negara Eropa lainnya. Melihat kondisi ini, kaum feminis berusaha menemukan cara untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen. Mereka membentuk *Mouvement pour la parité* yang berjuang untuk menyerukan parity antara laki-laki dan perempuan dalam segala bidang, terutama dalam perwakilan politik. Gerakan ini berkembang karena perasaan tidak suka terhadap institusi politik dan merupakan respon dari kekecewaan mengenai ketetapan partai politik. Tuntutan yang disampaikan berusaha merubah institusi politik yang menahan mereka untuk melancarkan kritik terhadap kaum elite yang menguasai politik Perancis. Melihat peningkatan yang tidak mewakili populasi di Perancis, gerakan feminis melancarkan aksi untuk merubah sistem kampanye yang digunakan agar keterwakilan perempuan lebih besar dalam parlemen.

¹⁸Jane Freedman, "Democracy and Citizenship: Theory and Practice" London (Akses, 16 Juli 2011); Sumber dari King's College, London.

Au pouvoir citoyennes! Liberté, Egalité, Parité merupakan pendorong utama dalam memperjuangkan parity. Buku yang dipublikasikan pada tahun 1992 oleh Françoise Gaspard, Anne Le Gall & Claude Servan-Schreiber tersebut menjelaskan kurangnya perempuan dalam pembentukan kebijakan politik dikarenakan keinginan Perancis untuk menjadi negara demokrasi, dan mereka merasa terpanggil untuk memperjuangkan keterwakilan yang sama untuk perempuan dalam semua bentuk keterwakilan, yang dijamin oleh hukum. Tuntutan ini diterima oleh banyak pendukung, dan dianggap mampu menghidupkan kembali gerakan feminisme yang kurang begitu aktif pada tahun-tahun sebelumnya.

Di Perancis keberadaan feminis mampu menggerakkan koordinasi dalam bentuk yang baru, diantaranya adalah *Reseau Femmes pour la Parité* yang telah diorganisasi dan *Parité-Infos* dan *La lettre de Parité* yang dipublikasikan secara reguler. Gerakan ini merupakan inspirasi untuk meningkatkan perempuan dalam politik. Dengan cara ini, perempuan sukses mendapatkan banyak perhatian dari media untuk gerakan mereka. Hasil yang diperoleh feminisme dengan dikeluarkannya manifesto yang ditandatangani oleh sepuluh orang politisi termasuk Edith Cresson dan mantan menteri yang lain, serta dipublikasikan secara eksklusif oleh majalah *L'Express*. Gerakan terus berlanjut dan permohonan tidak dikurangi, yakni untuk meningkatkan perempuan dalam politik. Gerakan ini juga mendapatkan dukungan yang luas dari perempuan yang tidak memiliki

Demonstrasi terjadi pada oktober 1993 di depan National Assembly, dihadiri oleh ribuan perempuan dan petisi yang dikirimkan pada Asosiasi Perempuan yang diterima pada 1995 mendapatkan dua puluh ribu tanda tangan selama sepuluh hari. Pada November 1993, *Le Monde* mempublikasikan '*Manifeste des 577 pour une democratie paritaire*', dari 577 sejumlah 288 orang laki-laki menandatangani manifesto tersebut.¹⁹

Tekanan menuntut parity di Perancis, datang dari 'grassroots,' yakni gerakan akar rumput dari parlemen dan partisipan yang menggunakan berbagai cara untuk menekan dan menuntut keterwakilan perempuan dalam parlemen terpenuhi. Feminisme Perancis memiliki cara yang terencana dalam hal menyusun strategi demonstrasi.

Mouvement pour la parité berhasil mendapatkan dukungan dan publikasi yang luas. Banyaknya debat, demonstrasi, artikel di surat kabar dan media elektronik mengakibatkan partai politik bereaksi. Hal ini terbukti dari dukungan untuk parity oleh partai politik mayoritas Perancis. Partai demokrasi dan partai Sosialis mengeluarkan deklarasi untuk mendukung parity. Pada September 1996 National Council mengumumkan akan memberikan tempat untuk kandidat perempuan pada pemilihan legislatif tahun 1998. Akan tetapi, penerapan deklarasi ini mengalami kendala. Di departemen Allier, kehadiran kandidat perempuan tidak ditandatangani oleh partai lokal. Distrik yang dipilih oleh partai lokal adalah Montluçon sangat sulit untuk kandidat Sosialis mengalahkan mayoritas Komunis

yang dipimpin Pierre Goldberg, terlebih lagi partai Komunis memberikan alasan bahwa mereka sangat sulit menemukan kandidat perempuan.

Partai RPR dan UDF menahan diri untuk mendukung parity, hal ini terjadi karena penolakan yang dilakukan oleh delapan dari duabelas menteri dalam pemerintahan Alain Juppe. Terjadinya penolakan mengakibatkan Alain Juppe membentuk *Observatoire pour la parité* yang dipimpin oleh ketua RPR yakni, Roseline Bachelot. Roseline bertugas mengisi laporan dan preposisi untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan. Observasi yang dilakukan ini mengundang banyak kritik dari para menteri anggota parlemen Alain Juppe, namun observasi ini tetap dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen dengan mereferendum isu mengenai parity.

Memiliki kekuatan yang mampu menekan untuk menyelidiki keterwakilan perempuan dalam politik, akan memberikan efek yang signifikan dalam budaya politik. Efek yang paling penting adalah menjadikan model feminis memiliki kekuatan normal dalam politik, mengakibatkan sangat sulit untuk membangun model positif dari kekuatan feminis. Kurangnya kehadiran perempuan dalam keterwakilan politik terdahulu merupakan simbol penghalang untuk memperoleh kekuatan positif feminisme. Kurangnya kekuatan yang dimiliki perempuan dalam politik ini seolah menjadikan perempuan pesimis dengan kedudukan mereka

C. Organisasi Feminisme Perancis

Gerakan feminisme di Perancis terus mengalami perkembangan. Perempuan-perempuan yang memiliki persamaan tujuan membentuk basis gerakan dan menyerukan keinginan mereka dengan berbagai cara. Organisasi feminisme di Perancis yang *pertama*, *Mouvement de Liberation des Femmes* (MLF) oleh media. Para perempuan yang tergabung dalam *Mouvement de liberation des femmes* ini lebih berbasis pada psikoanalisa dan kritik sosial. MLF lahir akibat protes yang dilakukan oleh mahasiswa dan kaum buruh pada Mei 1968.²⁰ Para aktivis perempuan yang menamakan dirinya "*revolutionary*" memberontak terhadap seksisme dan berjuang untuk melahirkan generasi-generasi yang berusaha merubah keadaan mereka. Gerakan perempuan pada saat itu tak luput dari perhatian media massa, protes yang dilakukan pada 26 Agustus 1970 menandai lahirnya MLF di Perancis.

Kedua, adalah *Feministes Revolutionares* (FR), berdiri sejak tahun 1970 yang merupakan bagian dari *Mouvement de Liberation des Femmes* (MLF) atau gerakan pembebasan perempuan. Kelompok *Feministes Revolutionares* tidak menggunakan pendekatan psikoanalisa dan sangat mengagungkan kesetaraan serta rata-rata didukung oleh kalangan lesbian. Teori dasar kelompok FR adalah menentang determinisme biologis, yaitu perempuan ter subordinasi dengan norma-norma maskulin, hal ini dikarenakan determinisme biologis menurut mereka merujuk pada pandangan tradisional esensialisme. Teori tradisional esensial

²⁰ *France. ?Feminism And The Women's Liberation Movement* (akses 29 Juli 2011); Sumber

menekankan bahwa perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan adalah fixed atau kodrat yang tidak dapat berubah. Perbedaan terjadi karena masyarakat patriarkhi menganggap perempuan sebagai "the other" dalam tataran biologis dan psikis. Salah satu contoh yang dapat diambil adalah, penanganan kasus pemerkosaan atau kekerasan terhadap perempuan, mereka akan mengandalkan argumen-argumen kelemahan perempuan, korban yang harus selalu dilindungi dan selalu mengalami ketidakadilan dari masyarakat yang patriarki. Argumen semacam ini terkesan manipulatif dan tidak bertanggung jawab.

Ketiga, organisasi ini bernama *Po et psych* atau *politique et psychoanalyse* organisasi yang digeluti Helene Cixous ini memiliki tujuan utamaya, melawan kaidah simbolis kebudayaan barat. Kelompok dibentuk dengan tujuan memberantas maskulin dan mendapatkan identitas perempuan. Kelompok ini telah secara resmi menyatakan oposisinya terhadap feminisme. Feminisme, disamakan dengan permintaan untuk kesetaraan, bukan sebagai strategi yang reformis phallogocentric. Mereka turun ke jalan pada Hari Perempuan tanggal 8 Maret 1968 dan meneriakkan: "Down with feminism". Sejak tahun 1960 kelompok ini telah berusaha mendekonstruksi wacana patriarki terutama wacana yang dikembangkan oleh *feministes revolutionnaires* (FR). Bagi kelompok *po et psych*, posisi FR menggunakan semangat humanisme yang mempunyai kategori fixed. Oleh karenanya *po et psych* mengadopsi teori psikoanalisa Freud yang mencoba menggunakan metode dekonstruksi dalam melihat teks-teks

kesetaraan (equality) seperti kelompok FR, yaitu identitas dan gender, tetapi lebih menekankan pada perbedaan (difference).

Keempat, organisasi Rainbow yang berdiri pada tahun 1986. Hingga tahun 1988, sebagian besar perempuan Perancis menjadi aktifis organisasi ini. Rainbow yang sangat keras memperjuangkan parity atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam segala bentuk pengambilan keputusan. Ketika kelompok ini dibubarkan pada tahun 1988, banyak dari aktifis bergabung dengan Partai Green yang menerapkan prinsip Paritas dalam anggaran dasar partai.

D. Tokoh Feminisme Perancis

Feminisme Perancis meliputi berbagai karya yang membahas perbedaan seksual yang ditulis oleh kaum perempuan yang terlibat dalam gerakan intelektual dan politik. Sebagai gerakan feminisme, mereka memiliki ciri khas karena dalam praktik penulisan terdapat tanda-tanda perbedaan dengan penulis feminis lainnya. Ada beberapa tokoh feminisme yang mempelopori gerakan feminisme di Perancis, diantaranya adalah:

1. Helene Cixous

Helene Cixous tergabung dalam kelompok *Psych et Po* sampai awal tahun 1980-an. Organisasi yang digelutinya ini memiliki tujuan utama melalui tulisan-tulisannya yakni, melawan kaidah simbolis kebudayaan barat. Tulisan-tulisan

keduanya sama-sama menaruh minat pada teks-teks Nietzsche, Bataille, dan Blanchot serta memiliki fokus analitis yang serupa. Cixous mengungkapkan pemikirannya mengalami perubahan sejak pertengahan tahun 1970-an.

Dari karyanya yakni *The Laugh of the Medusa*, *La Jeune Née* dinilai penting karena mengartikulasikan sejumlah perbedaan antara Cixous dan Catherine Clement yang dipaparkan dalam bagian ketiga. Pada bagian yang kedua Cixous menuliskan dengan judul *Sorties: "Out and Out: attacks/WaysOut/Forays"* yang merupakan tulisan seorang dekonstruktivis yang menguraikan kaitan antara sistem logosentrisme dan fallosentrisme. Tulisan Cixous mengalami pergeseran bukan hanya mengarah pada tekstualitas alternatif, akan tetapi menekankan pada praktik.

2. Julia Kristeva

Julia Kristeva berasal dari Bulgaria, dan tiba di Paris pada tahun 1965. Secara Eksplisit Julia Kristeva menolak feminisme sebagaimana kata itu didefinisi oleh teoris dan aktivis Perancis. Akan tetapi bukan berarti ia menolak tujuan dan strategi feminisme. Kristeva berpendapat bahwa kepercayaan seseorang yang berjenis kelamin perempuan bersifat mustahil begitupula dengan kepercayaan bahwa mereka berjenis kelamin laki-laki. Akan tetapi jika seseorang bisa menyamakan diri dengan identitas yang tergenderkan dan nalar politis terus berkampanye sebagai perempuan seseorang tidak akan menjadi seorang perempuan. Identitas seksual sebagai sisi sebaliknya hanya bisa terwujud dengan

cara memasuki tatanan simbolis. Jadi, identitas seksual bukan merupakan suatu esensi melainkan soal representasi.

Karya dari Julia Kristeva menitikberatkan kepada tanda atau semiotika yaitu dengan tatanan simbolis, tentang subjektivitas dan identitas. Kristeva mengkontraskan tahap “semiotik” atau “pra-oedipal” dengan tahap “simbolik” atau “pos-oedipal”. Menurutnya tatanan simbolik yang merupakan tatanan penandaan, atau ranah sosial terdiri dari dua elemen, yakni elemen semiotik yang merembes melalui daerah kekuasaan pra-oedipal, dan elemen simbolik yang hanya ada di dalam tatanan simbolik. Elemen simbolik adalah aspek penciptaan makna yang memungkinkan kita untuk mampu membuat argumen rasional; elemen ini menghasilkan tulisan yang linear, rasional, objektif dan sangat tunduk pada tata bahasa. Sedangkan elemen semiotik adalah aspek penciptaan makna yang memungkinkan kita untuk mengekspresikan perasaan, elemen ini merupakan pendorong ketika elemen semiotik melangsungkan proses penandaan. Elemen semiotik menghasilkan tulisan yang melanggar aturan: baik dalam sintaks maupun tata bahasanya. Hal ini yang diistilahkan oleh Kristeva dengan “abjek” dalam tatanan simbolik. Kristeva yakin bahwa seseorang yang terbebaskan adalah orang yang mampu bermain diantara ranah maternal, semiotik dan dan pra-oedipal dan ranah oedipal patriarkal di satu sisi dan dialektik diantara aspek penciptaan makna semiotik dan simbolik di dalam tatanan simbolik di sisi lainnya.²¹ Orang yang bebas adalah orang yang dapat bebas bergerak diantara chaos dan tatanan, revolusi dan status quo dari feminin dan maskulin.

3.Luce Irigaray

Irigaray adalah pakar psikoanalisis Lacanian dan akrab dengan disiplin filsafat. Namun, Irigaray selalu berusaha untuk menentang doktrin-doktrin filsafat dan psikoanalisis serta selalu mengkritiknya. Tujuan utamanya adalah membebaskan yang feminin dari pemikiran filsafat maskulin, termasuk pemikiran Lacan dan Freud.

Pemikiran Lacan menyatakan fase imajiner adalah ranah pra-oedipal yang pralinguistik, identifikasi spekulat ketika anak yang pada awalnya keliru mengenali dirinya yang asli dengan citra yang direfleksikan oleh cermin, perlahan-lahan menyadari bahwa citra yang direfleksikan oleh cermin bukanlah dirinya yang sesungguhnya. Menurutnya imajiner adalah penjara tempat diri menjadi tahanan dari citra-citra yang bersifat ilusi. Setelah berhasil menyelesaikan fase Oedipal, anak laki-laki dibebaskan dari ranah imajiner dan memasuki tatanan simbolik, wahana bahasa dan diri. Karena tidak pernah selesai melewati fase Oedipal, perempuan tertinggal di ranah imajiner. Berbeda dengan Lacan, Irigaray berpendapat di dalam ranah imajiner terdapat imajiner laki-laki dan imajiner perempuan. Ia memandang hidup perempuan dalam ranah imajiner penuh dengan kemungkinan yang sama sekali belum tersentuh bagi perempuan.

Jika perempuan ingin menjadikan dirinya sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar limbah atau eksek dalam margin yang berstruktur sangat kecil dalam dunia laki-laki ada tiga tindakan yang diklaim olehnya. *Pertama*, perempuan dapat menciptakan bahasa perempuan dengan menghindari bahasa yang netral gender sekuat perempuan menghindari bahasa laki-laki. Irigaray mendorong perempuan untuk menemukan keberanian untuk berbicara menggunakan kalimat

ketidakotentikan yang sesungguhnya dari kalimat pasif. *Kedua*, perempuan dapat menciptakan bahasa perempuan. Perempuan akan belajar untuk memikirkan pemikiran, untuk menggunakan kata-kata, dan melakukan tindakan yang cukup kuat untuk menggantikan falus. *Ketiga*, perempuan dapat meniru tiruan yang dibebankan laki-laki kepadanya dalam usaha untuk menjadi dirinya sendiri. Perempuan harus menerima citra laki-laki, kemudian merefleksikannya kembali pada laki-laki dalam proporsi yang dibesar-besarkan. Melalui peniruan ini perempuan dapat membongkar efek wacana falosentris dengan melebihkannya.

4. Christine Delphy

Pada tahun 1976 ia mengeluarkan esai yang bertajuk "*Protofeminism and antifeminism*" tulisan ini mengecam para perempuan yang mengabaikan gerakan yang telah berjasa memberikan mereka pemahaman yang lebih utuh. Esai yang ditulisnya tersebut sebagai sindiran terhadap tulisan Lecrec dan mereka yang tergabung dalam *Psych et Po* yang disebutnya sebagai "*protofeminism*" karena lebih bertitik tolak dari momen individual daripada pemberontakan kolektif dan mencapai kesimpulan akhir.

Karya Delphy mengutamakan determinan historis, ekonomis, dan sosial dalam menganalisis penindasan atas perempuan sehingga merupakan *feminisme materialis*.²² Delphy berpendapat adanya keharusan untuk mengkaji lebih luas mengenai materialisme, bukan hanya pada analisis yang dikemukakan Marxis atas kapitalisme. Delphy yang merupakan seorang sosiolog banyak menulis esai

tentang keluarga, dan tentang perkawinan serta kontraktualnya dalam rumah tangga.

5. Simone de Beauvoir

Tokoh feminis ini lahir di Paris, Perancis pada tanggal 9 Januari 1908. Simone adalah seorang penulis, pejuang wanita, ahli filsafat dan ahli teori sosial. Tulisan-tulisan yang ditelurkannya berbentuk roman, filosofi, politik, isu-isu sosial, esai dan autobiografi. Karya-karya dari Simone yang mengangkat namanya sebagai seorang penulis, salah satunya adalah *The Second Sex*. Tulisan yang mengupas secara detail tekanan terhadap perempuan. Tulisan Simone tersebut menjadi dasar pergerakan dari feminisme pada masa itu.

Dalam *The Second Sex*, Simone berargumen bahwa laki-laki telah menciptakan anggapan bahwa perempuan itu sebagai “other” atau yang lain. Anggapan ini berkembang dalam kehidupan sosial yang menyangkut ras, kelas, dan agama. Maksudnya disini adalah, adanya tingkatan kedudukan antara perempuan dan laki-laki, dimana perempuan menduduki tempat kedua dalam ranah sosial. Pemahaman sebagai “other” dalam tatanan masyarakat itu dibentuk oleh kaum laki-laki dengan menggunakan aura palsu yang disebut “mystery” oleh Simone. Pemikiran bahwa laki-laki merupakan kaum yang ideal dan perempuan harus menjadi yang ideal untuk sukses dibantah keras oleh Simone. Asumsi seperti itu akan membatasi kesuksesan perempuan. Untuk menciptakan feminisme yang bergerak maju asumsi yang berkembang seperti ini harus dikesampingkan. Ia menyatakan perempuan itu sama dengan laki-laki, dalam segala bidang.